

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

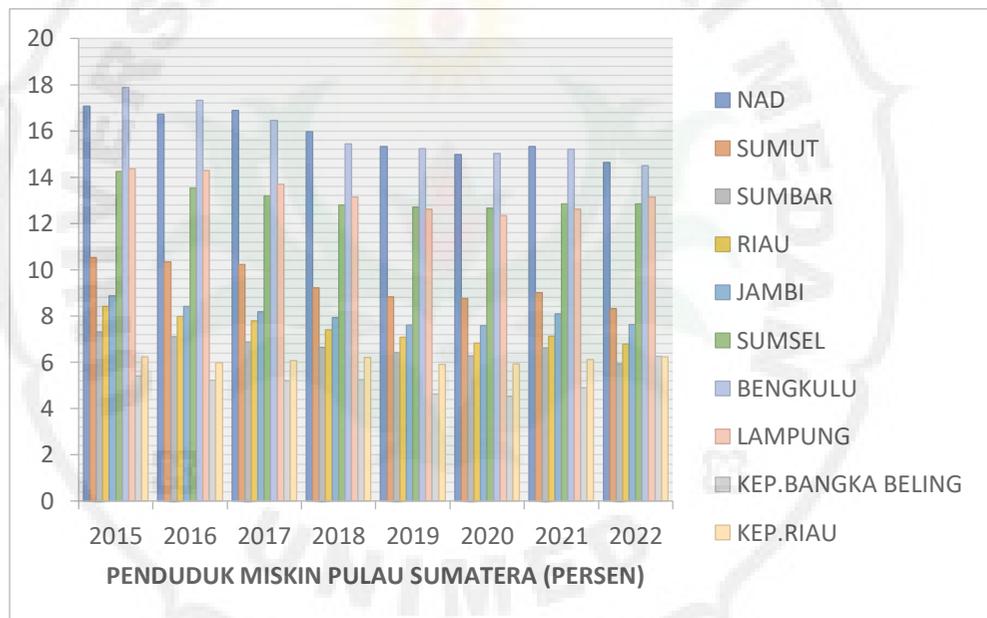
Secara global pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, mewujudkan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi masyarakat dan negara. Hal itu sesuai isi dari cita-cita bangsa ini mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu upaya mengatasi kemiskinan. Karena kemiskinan adalah persoalan yang tidak kunjung usai dan semua negara pasti mengalami persoalan ini baik itu dalam tingkatan kecil sampai tingkatan yang memprihatinkan.

Masalah kemiskinan bukanlah masalah yang dapat dibiarkan begitu saja, persoalan ini harus diatasi dari akarnya. Jika tidak diatasi akan menjadi faktor penghambat pembangunan dan pemerataan wilayah. Individu dikatakan miskin apabila tidak mampu memanfaatkan pilihan dan kesempatan yang tersedia baginya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pemeliharaan kesehatan, standar hidup yang layak, rasa kebebasan, kemandirian, 9 \kemandirian, penghargaan, dan rasa hormat dari orang lain. (World Bank, 2015)

Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi sebuah negara. Bukan hanya dampak sosial saja namun secara langsung memberikan dampak pada individu dan berimbas kepada masyarakat luas.

Dengan tingginya angka kemiskinan di sebuah negara maka akan terjadi angka pengangguran yang besar. Berikut akan dilampirkan data penduduk miskin di pulau sumatera dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, pulau ini berisikan 10 dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.

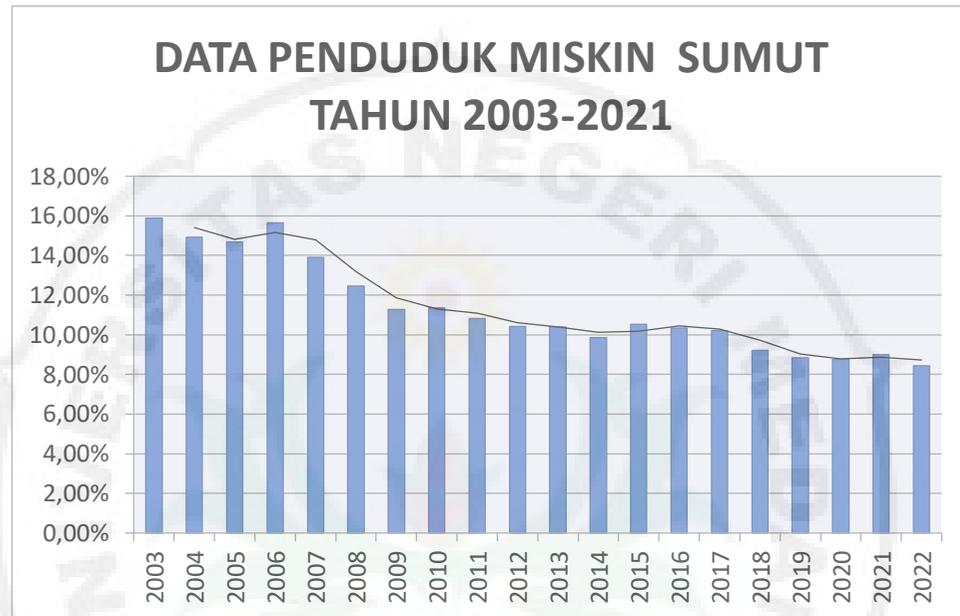
**Gambar 1. 1 Diagram Batang Penduduk Miskin Pulau Sumatera (persen)**



Sumber : BPS (2023)

Dari tabel diatas, Provinsi Sumatera Utara sendiri menempati urutan provinsi no 5 dari 10 provinsi dengan tingkat penduduk miskin terbanyak, persentase rata-rata 9,40 % dalam waktu 8 tahun terakhir. Trend kemiskinan Sumatera Utara cenderung meningkat, hal ini tidak terlepas dari adanya pandemi covid pada tahun 2019-2021 yang menyebabkan lumpuhnya roda perekonomian di seluruh provinsi maupun negara di dunia.

**Gambar 1. 2 Diagram Batang Data Penduduk Miskin Sumatera Utara (persen).**



Sumber : BPS SUMUT

Di Provinsi Sumatera Utara, kemiskinan merupakan masalah yang amat sangat krusial, tidak hanya kondesinya yang semakin meningkat, namun akibat dari kemiskinan ini tidak hanya mencakup ruang lingkup ekonomi belaka. Akibat dari kemiskinan ini juga mengakibatkan masalah sosial dan membuat seseorang susah mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga terjadilah tindakan-tindakan seperti pencurian dan naiknya angka kriminalitas. Jumlah penduduk Sumatera Utara juga terus mengalami kenaikan setiap tahunnya yang keadaan ini jika tidak diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia maka akan membuat kemiskinan kian susah diatasi. Selain jumlah penduduk, inflasi di Provinsi ini setiap tahun kian meningkat sehingga menyebabkan harga bahan baku terus meningkat dan dapat memicu kemiskinan kian naik.

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh tingginya inflasi dan jumlah penduduk suatu negara yang tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang ada (Nelson dan Liebstein) Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat mempunyai pengaruh. Menurut Nelson dan Leibstein, pertumbuhan penduduk yang pesat di negara-negara berkembang tidak secara signifikan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan dalam jangka panjang akan menurunkan kesejahteraan dan menambah jumlah penduduk miskin. Bertambahnya jumlah penduduk memang membuat efek positif yakni ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah dan banyaknya wirausaha yang timbul namun jumlah penduduk yang besar juga sangat erat berhubungan dengan kemiskinan. Hal ini terjadi karena produksi hasil pertanian yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan manusia itu sendiri, dengan demikian akan berefek pada susahya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu akan berimbas kepada meningkatnya angka kemiskinan. Faktor lainnya yang menyebabkan kemiskinan ialah inflasi.

Salah satu indikator perekonomian yang sangat erat dengan kemiskinan ialah inflasi. Menurut Mankiw (2003), jika inflasi naik dan nilai mata uang riil berfluktuasi secara signifikan, inflasi yang lebih tinggi tentu akan menaikkan garis kemiskinan. Inflasi sendiri mempunyai dampak baik dan buruk, Dampak buruk dari inflasi yaitu akan menaikkan harga barang dan jasa secara umum secara terus menerus yang secara langsung akan menaikkan angka kemiskinan. Pada awalnya masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, namun karena semakin tinggi

inflasi maka akan semakin sulit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tingkat inflasi di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Faktor pengaruh lainnya yang menyebabkan tingkat kemiskinan bertambah adalah tingginya angka pengangguran di suatu daerah. Kehilangan pekerjaan merupakan salah satu peristiwa tersulit dalam hidup seseorang. Menurut Sukirno (2016), Dampak negatif dari pengangguran adalah menurunkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemakmuran suatu individu. Peluang masyarakat untuk terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan tentu akan meningkat akibat turunnya tunjangan kesejahteraan akibat pengangguran. Banyak orang khususnya negara berkembang hanya mengandalkan mata pencaharian mereka untuk menyambung hidupnya. Kehilangan pekerjaan akan membuat seseorang tidak mempunyai penghasilan dan bila tidak mendapatkan pekerjaan sesegera mungkin akan mengakibatkan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya dan kehilangan harga diri. Hal pengangguran ini sendiri sering dijadikan isu para politisi untuk menggalang suara dengan menjanjikan kebijakan dan usulan untuk menciptakan lapangan kerja baru.

**Tabel 1. 1 Pengangguran Terbuka, Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2003-2021**

Tahun	Penduduk Miskin (Persen)	Pengangguran Terbuka (persen)	Inflasi (persen)	Jumlah Penduduk ( jiwa )
2003	15,89%	7,71%	4,23%	11890399
2004	14,93%	13,75%	6,80%	12123360
2005	14,68%	10,98%	22,41%	12326678
2006	15,66%	11,51%	6,11%	12643494
2007	13,90%	10,10%	6,60%	12834371
2008	12,47%	9,10%	10,72%	13042317
2009	11,27%	8,45%	2,61%	13248386
2010	11,36%	7,43%	8,00%	13028663
2011	10,83%	6,37%	3,67%	13220936
2012	10,41%	6,20%	3,86%	13408202
2013	10,39%	6,53%	10,18%	13590250
2014	9,85%	6,23%	8,17%	13766851
2015	10,53%	6,71%	3,24%	13937797
2016	10,35%	5,84%	6,34%	14102911
2017	10,22%	5,60%	3,20%	14262147
2018	9,22%	5,56%	1,23%	14415391
2019	8,83%	5,41%	2,33%	14562549
2020	8,75%	6,91%	1,96%	14703532
2021	9,01%	6,33%	6,14%	14936148
2022	8,45%	6,16%	5,66%	15115206

Sumber : BPS (2023)

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh BPS dalam tabel 1.3 menunjukkan jumlah penduduk miskin Sumatera Utara dari tahun 2003-2019 mengalami penurunan sebesar 7,06%. Namun, pada tahun 2019-2021 terjadi krisis pandemi covid 19 yang menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0.18% pada tahun 2021. Penurunan penduduk miskin dari tahun 2006 sampai 2019 sebelum masa pandemi dan dapat dikatakan usaha pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dikatakan sudah cukup baik.

Menurut penjelasan tabel 1.3, dari rentang tahun 2003-2022 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi di Sumatera Utara, pada tahun 2013 terjadi kenaikan harga BBM namun pada tahun 2013-2014 justru mengalami penurunan penduduk miskin dari 10,39% hingga 9,85% pada tahun 2014. Dari data tersebut dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin setelah kenaikan harga BBM yang menyebabkan tingkat inflasi naik justru tidak berdampak pada kenaikan angka penduduk miskin pada tahun 2013-2014. Menurut Nelson dan Liebstein (1983) pertumbuhan penduduk suatu negara yang pesat tidak akan menghasilkan peningkatan yang signifikan pada tingkat kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan dan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Menurut tabel 1.3, jumlah penduduk Sumatera Utara yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana terlampir dalam tabel 1.2 terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Tahun 2003 penduduk Sumatera Utara sebanyak 11890399 jiwa dan terus meningkat menjadi 15115206 jiwa pada

tahun 2022. Jika diulas lebih mendalam pemerintah sebenarnya sudah melakukan beberapa strategi untuk mengendalikan jumlah penduduk, salah satunya program keluarga berencana (KB) namun dapat dilihat seperti data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Sumatera utara terus mengalami kenaikan.

Dari gambaran tabel 1.3 menyatakan bahwasanya jumlah penduduk akan terus meningkat dengan kemiskinan yang fluktuatif, seharusnya sumber daya yang berkuantitas besar ini dapat bermanfaat oleh pemerintah sebagai faktor produksi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah dapat menyeimbangkan kuantitas peluang kerja.

Jumlah penduduk Sumatera Utara yang tinggi tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas serta tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, di Sumut ada 813,7 ribu orang yang melanjutkan ke pendidikan tinggi atau 5,36 persen, dan 1.476 orang bergelar PhD(S3) atau 0,01 persen. Kemudian, hingga 30.528 orang (0,2 persen) menyelesaikan gelar Masternya(S2). Sedangkan penduduk yang menerima sertifikasi empat tahun(S1) sebanyak 537,44 ribu orang (3,54%). Di Sumut, 193,03 ribu orang atau 1,27 persen menyelesaikan pendidikan hingga jenjang D3. kemudian 51,23 ribu orang atau 0,34 persen berpendidikan D1 dan D2. Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang besar

tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

Selanjutnya yang mempengaruhi penduduk miskin yaitu inflasi, menurut Mankiw (2003) jika inflasi naik dan nilai mata uang riil berfluktuasi secara signifikan, inflasi yang lebih tinggi tentu akan menaikkan garis kemiskinan. Inflasi yang meningkat akan mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin, terutama jika daya beli dan pendapatan kelompok yang berpendapatan rendah tidak disertai peningkatan.

Dari tabel 1.3 ditunjukkan bahwa persentase inflasi di Sumatera Utara mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2005 inflasi berada di titik tertinggi pada titik 22,41%, merupakan tahun pertama pemerintahan kabinet SBY, kebijakan kenaikan harga BBM 100 persen yang mengakibatkan kenaikan tajam harga kebutuhan sehari-hari termasuk semua barang dan jasa yang ada. Namun pada tahun berikutnya mengalami perubahan, laju pertumbuhan inflasi kembali ke tingkat yang lebih aman dan sudah mengalami penyesuaian. Namun pada tahun 2008 kembali mengalami kenaikan akibat kenaikan harga minyak mentah internasional yang dipicu oleh kenaikan harga BBM secara menyeluruh. Perekonomian Sumut serta bangsa secara keseluruhan sangat terpengaruh oleh kondisi ini.

Hingga 2012 ke angka 3,67%, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ditahun 2012 untuk menekan inflasi yaitu dengan melakukan penguatan ketahanan pangan dengan melaksanakan sistem resi gudang (RSG) dan meningkatkan

produksi pangan. Lalu kembali mengalami kenaikan inflasi yang cukup tinggi diakibatkan adanya kenaikan BBM di tahun 2013 tersebut hingga mencapai 10,18%. Hingga tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 2,33% dikarenakan harga sudah mulai menyesuaikan dengan kenaikan BBM. Pada tahun 2020 mengalami masa pandemi namun inflasi mengalami kenaikan bahkan turun sebesar 1,96% lalu pada tahun 2021 pada tahun ini masih mengalami masa pandemi barulah inflasi naik hingga 6,14%. Hal-hal diatas yang harus diperhatikan untuk melihat angka kemiskinan mengalami penurunan yang berarti dan sebanding dengan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya.

Selain jumlah penduduk dan inflasi, pengangguran juga berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Menurut Sukirno (2016), Dampak negatif pengangguran adalah menurunkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemakmuran suatu individu. Peluang masyarakat untuk terjebak pada kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan tentu akan meningkat akibat turunnya tunjangan kesejahteraan akibat pengangguran.

Menurut tabel 1,3 tingkat pengangguran terbuka Sumatera utara mengalami pergerakan fluktuatif. Fase tertinggi angka pengangguran terbuka sumut ialah tahun 2004 sebesar 13,75%. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Utara menunjukkan tingginya angka pengangguran di 3 kabupaten di Sumatera Utara yakni Tapanuli Tengah, Labuhan Batu dan simalungun. Namun pada tahun berikutnya sudah mengalami penurunan. Pada

tahun 2005 tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,98% dikarenakan adanya kejadian alam yakni gempa bumi di Nias yang menyebabkan kelonjakan yang cukup signifikan angka pengangguran di tahun 2005 dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini tidak terlepas dari program pemagangan dalam negeri dan keberhasilan pemerintah Sumatera Utara dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2020 dan 2021 Sumatera Utara mengalami pandemi covid yang menyebabkan angka pengangguran terbuka mengalami kenaikan kembali.

Sehingga faktor faktor yang mempengaruhi kemiskinan dalam hal inilah yang ingin diteliti adalah jumlah penduduk, pengangguran dan inflasi. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah meneliti yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Mahsunah (2013), menyimpulkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan sedangkan pendidikan dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Selanjutnya menurut Suhariato dan Lubis (2022), menyimpulkan bahwa secara simultan dan parsial pengangguran dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Dari uraian penjelasan diatas dan atas landasan tersebut, penulis merasa terdorong dan ingin mengetahui lebih dalam untuk meneliti masalah “Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara”

## 1.2. Identifikasi Masalah

Dapat diidentifikasi permasalahan dari latar belakang masalah di atas yaitu:

1. Jumlah Penduduk Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun dan angka penduduk miskin mengalami fluktuasi meskipun dari tahun 2017 terus mengalami penurunan.
2. Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara mengalami penurunan dalam waktu beberapa tahun terakhir. Walaupun pada tahun 2021 mengalami kenaikan karena adanya pandemi covid 19.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara mengalami kondisi yang fluktuatif namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan akibat adanya pandemi Covid 19 yang membuat perekonomian lumpuh.
4. Inflasi Sumatera Utara mengalami kondisi yang fluktuatif, pada 2021 mengalami kenaikan akibat adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan kelangkaan karena adanya aturan Work From Home (WFH) yang mengakibatkan produksi berkurang karena banyak perusahaan dilarang melakukan kegiatannya.

## 1.3. Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini menggunakan variabel pengangguran, inflasi, jumlah penduduk dan kemiskinan.
2. Data untuk variabel penelitian diambil dari Provinsi Sumatera Utara.

3. Data yang dipakai ialah data time series dari tahun 2003 – 2021

#### 1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka panjang ?
2. Apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka pendek ?
3. Apakah terdapat pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka panjang ?
4. Apakah terdapat pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Utara dalam Jangka Pendek?
5. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka panjang?
6. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Sumatera Utara dalam Jangka Pendek?
7. Apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan inflasi di Sumatera Utara?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini , yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka panjang.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka pendek.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka panjang.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Utara dalam Jangka Pendek.
5. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Sumatera Utara dalam jangka panjang.
6. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Sumatera Utara dalam Jangka Pendek.
7. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan inflasi di Sumatera Utara.

### 1.6. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai evaluasi dan masukan untuk pemerintah, khususnya untuk pemerintah sumatera utara dalam menciptakan kesejahteraan dan

memperbaiki kemiskinan di Sumatera Utara guna menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih baik.

2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Sumatera Utara untuk meminimalisasi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara agar dapat tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.
3. Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan tentang jumlah penduduk, inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.
4. Sebagai syarat untuk peneliti dalam meraih gelar sarjana di Universitas Negeri Medan.
5. Sebagai referensi untuk peneliti lainnya yang berminat dan mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.